

Pengaruh Dana Perimbangan, Kemandirian Daerah, dan Pertumbuhan Pendapatan Daerah Terhadap Belanja Fungsi Pendidikan

Rendy Ananda Putra*, Indarti Diah Palupi

¹²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, Indonesia
Email:¹*rendsananda@gmail.com, ²idp121@ums.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana perimbangan, kemandirian daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah terhadap belanja fungsi pendidikan. Populasi penelitian adalah seluruh Kabupaten/Kota di Pulau Jawa yang terdaftar di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2017-2019. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel akhir sebanyak 65 Kabupaten/Kota. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan total data panel sebanyak 188 data. Pengujian data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja fungsi pendidikan sedangkan kemandirian daerah dan pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja fungsi pendidikan.

Kata Kunci: Belanja Fungsi Pendidikan, Dana Perimbangan, Kemandirian Daerah, Pertumbuhan Pendapatan Daerah

1. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu penentu kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan di suatu negara. Pendidikan di Indonesia diatur pada pasal 31 UUD 1945. Pada ayat 1 diatur bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Ayat 2 menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dalam undang-undang. Ayat 4 menugaskan negara untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pendidikan nasional.

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin terselenggarakannya pendidikan yang bermutu tinggi. Tanggung jawab tersebut diwujudkan dalam bentuk alokasi belanja pendidikan. Pada pemerintah daerah, besaran belanja pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber pendanaan serta perubahan dari sumber pendanaan tersebut. Faktor sumber pendanaan mengacu kepada dana perimbangan dan kemandirian daerah. Dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah, terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik [7]. Tujuan utama pemberian dana perimbangan adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, kesenjangan fiskal antar pemerintah daerah, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidakefisienan fiskal [12]. Hal ini berdampak pada kesejahteraan masyarakat, salah satunya adalah belanja modal sektor pendidikan.

Kemandirian keuangan daerah adalah rasio yang dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah [2]. Menurut [14] kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah, dimana semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah dapat menunjukkan kontribusi yang besar masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, dimana kedua hal tersebut merupakan komponen dari pendapatan asli daerah.

Faktor perubahan sumber pendanaan mengacu kepada pertumbuhan pendapatan. Pertumbuhan pendapatan menggambarkan kemampuan pemda dalam mempertahankan kapasitas pelayanan publik. Melalui pertumbuhan pendapatan maka dapat diketahui kapasitas pembiayaan pemerintah daerah [6]. Ketika pendapatan pemda bertumbuh, maka ruang untuk mengalokasikan sumber daya ke dalam belanja semakin terbuka termasuk alokasi ke dalam belanja pendidikan karena pertumbuhan pendapatan berkaitan dengan pelayanan publik untuk pendidikan [3].

Penelitian mengenai belanja pendidikan relatif terbatas. Penelitian ini dilakukan untuk menambah literatur dalam tema tersebut dengan menguji pengaruh dana perimbangan, kemandirian daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah terhadap belanja fungsi pendidikan.

2. METODOLOGI PENELITIAN

2.1 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian terdiri dari 119 kabupaten/kota yang terdaftar di Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan (DJPK) tahun 2017-2019. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, diperoleh 65 kabupaten/kota. Total data panel setelah dikurangi dengan data yang tidak lengkap dan outlier menghasilkan 188 data. Analisis menggunakan regresi linier berganda.

2.2 Belanja Fungsi Pendidikan

Belanja pendidikan merupakan belanja wajib untuk menyelenggarakan pendidikan [1]. Pendanaan pendidikan menjelaskan anggaran belanja untuk melaksanakan fungsi pendidikan pada sektor pendidikan dalam APBD setiap tahun anggaran sekurang-kurangnya dialokasikan 20% dari belanja daerah diluar gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan yang terkandung dalam pasal 81 PP No. 48/2008 [15].

2.3 Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004). Dana perimbangan terdiri dari dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil. Tujuan dana perimbangan adalah menurunkan kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah [3]. Salah satu tujuan pemanfaatan dana perimbangan adalah untuk penyelenggaraan pendidikan sehingga dikatakan dana perimbangan memiliki memberikan pengaruh positif terhadap belanja pendidikan, sesuai hasil penelitian [15], [4], [9].

H1 : Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap fungsi belanja pendidikan

$$DP = DAU + DAK + DBH \quad (1)$$

2.4 Kemandirian Daerah

Kemandirian daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) seperti pajak daerah dan redistribusi daerah. Pembangunan daerah bisa terwujud apabila disertai kemandirian daerah yang efektif. Ini berarti bahwa pemerintah daerah secara finansial harus bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin menggali sumber-sumber PAD seperti pajak daerah dan redistribusi daerah. Kemandirian daerah dapat menunjang pelayanan pemerintah daerah dalam bidang pendidikan. Semakin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah, semakin berdampak positif terhadap alokasi belanja pendidikan [11], [9],[8].

H2: kemandirian daerah berpengaruh positif terhadap fungsi belanja pendidikan

$$KD = \frac{\text{pendapat asli daerah}}{\text{bantuan pemerintah pusat / provinsi dan pinjaman}} \times 100\% \quad (2)$$

2.5 Pertumbuhan Pendapatan Daerah

Pertumbuhan pendapatan dapat dilihat dari kemampuan pemda dalam mempertahankan atau meningkatkan realisasi pendapatan dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan ini mencerminkan kemampuan pemda dalam mempertahankan kapasitas pelayanan publik [4]. Pertumbuhan pendapatan daerah akan berpengaruh terhadap besaran anggaran belanja pendidikan. Semakin tinggi pertumbuhan pendapatan daerah maka persentase belanja pendidikan akan meningkat [1], [5], [3].

H3: Pertumbuhan pendapatan daerah berpengaruh positif terhadap fungsi belanja pendidikan

$$PPD = \frac{(\text{pendapatan tahun } n - \text{pendapatan tahun } n-1)}{\text{pendapatan tahun } n-1} \quad (3)$$

2.6 Metode Analisis

Analisis data penelitian mencakup statistik deskriptif, uji normalitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji heterokedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Uji hipotesis mencakup uji simultan (uji F), uji koefisien determinasi, serta uji parsial (uji t). Model persamaan regresi linear berganda penelitian ini:

$$BFP = \alpha + \beta_1 DP_1 + \beta_2 KD_2 + \beta_3 PPD_3 + e \quad (4)$$

Keterangan:

BFP : Belanja Fungsi Pendidikan

α : Konstanta

$\beta_1 DP_1$: Dana Perimbangan

$\beta_2 KD_2$: Kemandirian Daerah

$\beta_3 PPD_3$: Pertumbuhan Pendapatan Daerah

e : *error*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

a. Uji Statistik Deskriptif

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BFP188	086846822.000	21778832536245.000	1027380366483.410	2089758303455.757

DP 188504625834617	18969291389929	1674744564922.79	2024412122554.331
KD 188	0.429	261761.990	1585.754
PPD188	-0.141	0.595	0.059

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2017-2019 yang terlampir pada tabel 1, Belanja Fungsi Pendidikan tertinggi terdapat pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 21.778.832.536.245. Sedangkan Belanja Fungsi Pendidikan terendah terdapat pada Kabupaten Sleman tahun 2017 yakni sebesar Rp. 198.684.622.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2017-2019 yang terlampir pada tabel 1, Dana Perimbangan terdapat pada Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 18.969.291.389.929. Sedangkan Dana Perimbangan terendah terdapat pada Kota Banjar tahun 2019 yakni sebesar Rp. 504.625.834.617.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2017-2019 yang terlampir pada lampiran I, Kemandirian Daerah terdapat pada Kota Yogyakarta tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 261.761.990. Sedangkan Kemandirian Daerah terendah terdapat pada Kabupaten Tasikmalaya tahun 2019 yakni sebesar Rp. 0.429.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA 2017-2019 yang terlampir pada tabel 1, Pertumbuhan Pendapatan Daerah terdapat pada Kabupaten Bojonegoro tahun 2018 yaitu sebesar Rp. 0.595. Sedangkan Pertumbuhan Pendapatan Daerah terendah terdapat pada Kota Cimahi tahun 2018 yakni sebesar Rp. -0.141.

Berdasarkan tabel 1, nilai mean Belanja Fungsi Pendidikan yaitu sebesar 1.027.380.366.483.410 dengan standar deviasi sebesar 2.089.758.303.455.757.000. Nilai mean Dana Perimbangan sebesar 1.674.744.564.922.79 dengan standar deviasi sebesar 2.024.412.122.554.331. Nilai mean Kemandirian Daerah sebesar 1.585.754 dengan standar deviasi sebesar 18.935.278. Nilai mean Pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 0.059 dengan standar deviasi sebesar 0.069.

b. Uji Normalitas dan Asumsi Klasik

Berdasarkan *Central Limit Theorem* data penelitian berjumlah 188 terdistribusi normal karena jumlah data >30 .

Tabel 2. Uji Multikolinieritas, heterokedastisitas, dan Autokorelasi

Model	Tolerance	VIF	Sig. (2-tailed) Dependen Var Absolut Residual	Durbin-Watson
1	DP 0.971	1.030	0.700	1.142
	KD 0.974	1.038	0.805	
	PPD 0.937	1.067	0.116	

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel 2, semua variabel memiliki nilai tolerance $\geq 0,10$ dan nilai VIF ≤ 10 maka pada data penelitian tidak terjadi multikolinieritas. Semua variabel bebas memiliki nilai signifikansi $> 0,05$ pada regresi antara variabel independen dengan variabel dependen absolut residual yang menunjukkan tidak terjadi heterokedastisitas pada model penelitian. Nilai *Durbin-Watson* sebesar 1.142 ada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi.

c. Uji F dan Uji Koefisien Determinasi R^2

Berdasarkan data pada tabel 3 diperoleh nilai F sebesar 134.512. Nilai signifikansi F sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka variabel dana perimbangan, kemandirian daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah berpengaruh simultan terhadap belanja fungsi pendidikan. Nilai koefisien determinasi R^2 sebesar 0.682, artinya variabel dana perimbangan, kemandirian daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah mempengaruhi belanja fungsi pendidikan sebesar 68,2% dan sisanya 31,8% dipengaruhi oleh variabel lain diluar model regresi.

Tabel 3. Uji Analisis Regresi Linier Berganda

Unstandardized Coefficients			
Model	B	t	Sig.
(Constant)	211779755543.101	-3.973	0.000
DP	0.685	19.635	0.000
KD	-4783459.449	-0.736	0.462
PPD	280919438059.890	0.802	0.423
T-tabel	1,97331		
Dependent Variabel: BFP			
F	134.512		
Sig.	0.000		
Adjusted	0,682		

R Square

- d. Uji t (Pengujian Secara Parsial)
Berdasarkan tabel 3 dapat diketahui Sig. (DP) sebesar 0.000 lebih kecil dari 0.05 maka dana perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan. Sedangkan Sig. (KD) sebesar 0.462 dan Sig. (PPD) sebesar 0.423 lebih besar dari 0.05 sehingga kemandirian daerah dan pengaruh pertumbuhan daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan.

4.2 Pembahasan

- a. Dana Perimbangan dan Belanja Fungsi Pendidikan
Hasil analisis data di atas menyebutkan bahwa dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja fungsi pendidikan yang terbukti secara statistik. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya dana perimbangan dapat memberikan dampak peningkatan belanja fungsi pendidikan. Apabila pemerintah daerah di Indonesia memfokuskan pada peningkatan dana perimbangan, maka belanja fungsi pendidikan daerah tersebut juga akan meningkat. Sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan kemandirian daerah tersebut. Hasil penelitian mengenai dana perimbangan ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan [15], [4]
- b. Kemandirian Daerah dan Belanja Fungsi Pendidikan
Hasil analisis data di atas menyebutkan bahwa kemandirian daerah tidak berpengaruh terhadap belanja fungsi pendidikan yang terbukti secara statistik. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya kemandirian daerah tidak memberikan dampak terhadap peningkatan belanja fungsi pendidikan. Hal ini merupakan bukti adanya kecenderungan pemerintah daerah tidak menggunakan PAD sebagai sumber pendanaan untuk pendidikan. Sejatinya, pajak daerah digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam menyediakan berbagai sarana dan prasarana pendidikan. Hasil penelitian mengenai kemandirian daerah ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan [1], [11]
- c. Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Belanja Fungsi Pendidikan
Hasil analisis data di atas menyebutkan bahwa pengaruh pertumbuhan daerah tidak berpengaruh terhadap belanja fungsi pendidikan yang terbukti secara statistik. Hasil ini membuktikan bahwa dengan meningkatnya pengaruh pertumbuhan daerah tidak memberikan dampak terhadap peningkatan belanja fungsi pendidikan. Pendapatan daerah merupakan sumber utama pendanaan untuk belanja daerah, termasuk belanja pendidikan. Ketika regulasi mewajibkan pemerintah daerah mengalokasikan sumber daya sebesar 20 persen untuk pendidikan, dengan asumsi sumber pendanaan lain konstan, maka pertumbuhan pendapatan daerah akan berpengaruh terhadap besaran anggaran belanja pendidikan. Artinya, pertumbuhan pendapatan daerah memiliki korelasi positif dengan persentase relatif belanja pendidikan. Namun, hasil penelitian ini tidak menemukan adanya pengaruh signifikan pertumbuhan pendapatan daerah terhadap belanja fungsi pendidikan. Hasil penelitian mengenai pertumbuhan pendapatan daerah ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang dilakukan [1], [5]

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pengujian terhadap model penelitian, dapat disimpulkan bahwa hanya variabel dana perimbangan yang berpengaruh signifikan terhadap belanja fungsi keuangan. Semakin tinggi nilai dana yang bersumber dari pendapatan APBD yang dialokasikan untuk daerah otonom, maka semakin tinggi tingkat belanja fungsi pendidikan. Variabel-variabel lain yaitu kemandirian daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja fungsi pendidikan. Keterbatasan pada penelitian ini yakni data hanya mencakup Pulau Jawa sehingga hanya memberikan gambaran sampel yang terbatas. Keterbatasan lainnya adalah peneliti hanya menggunakan tiga variabel yaitu dana perimbangan, kemandirian daerah, dan pertumbuhan pendapatan daerah sehingga tidak dapat mewakili gambaran keseluruhan determinan. Keterbatasan lainnya adalah tahun penelitian yang terbatas membatasi kesimpulan hanya pada tahun yang diteliti. Penelitian selanjutnya diharapkan menambahkan variabel independen dalam menganalisis belanja fungsi pendidikan, sehingga dapat menggambarkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi belanja fungsi keuangan seperti pendapatan asli daerah, sisa anggaran tahun lalu, kinerja keuangan, dan lain-lain. Peneliti selanjutnya diharapkan menambah tahun penelitian agar tidak terfokus pada tahun tersebut saja. Penelitian selanjutnya diharapkan menambah luas persebaran sampel agar tidak hanya terpaku pada Pulau Jawa saja yang menjadi sampel peneliti.

REFERENCES

- [1] Abdullah, S., Saputra, M., Fazella, D., Hasnawati, H., & Afridzal, A. (2019). Determinan Kinerja Anggaran Belanja Pendidikan Pada Kabupaten/Kota Di Aceh. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19(2), 149.
- [2] Amalia, F. R., Purbadharmaja, & BP, I. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Kereserasian Alokasi Belanja terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 3(2303-178), 257-264
- [3] Faguet, Jean-Paul & Fabio Sanchez. 2008. Decentralization's Effects on Educational Outcomes in Bolivia And Colombia. *World Development* 36(7): 1294-1316.
- [4] Febriani, D., & Asmara, J. A. (2018). Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Fungsi Pendidikan (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(4), 585-599.
- [5] Jabbar, Najumunisha Abdul & Doris Padmini Selvaratnam. 2017. Analysis of the Determinants of Education Expenditures in

- Malaysia. *Journal of International Business, Economics and Entrepreneurship* 2(1):1-10.
- [6] Mahmudi. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Edisi kedua. UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- [7] Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. (2014). Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*. Vol.2, No.1 : 646-655.
- [8] Maulidya Wahyuni, 15321016, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad), Dana Alokasi Ksusus (Dak), Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Bagi Hasil (Dbh) Terhadap Belanja Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur”, Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik, Mei 2019
- [9] Miskalina, Isyfina (2016) *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa*. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
- [10] Nugraha, N., & Amelia, T. (2018). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten dan Kota di Jawa Barat Tahun 2011 – 2014. *Jurnal Wacana Kinerja: Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi Pelayanan Publik*, 20(1), 51.
- [11] Rohmawati, Cindy Auwaliyah (2017) *Kontribusi PAD, DAU, DAK Terhadap Belanja Daerah Untuk Pendidikan di Provinsi Jawa Timur*. undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Gresik.
- [12] Santoso, Imam & I Wayan Suparta. (2015). Flypaper Effect pada Pengelolaan Keuangan Daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vol.4 No.2 : 135-165.
- [13] Septiani Fitria. (2016). *Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran (Studi Kasus Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Priode 2012- 2013)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta
- [14] Ulum, I. (2009). *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [15] Yunina, F., & Handayani, T. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. *Jurnal Akuntansi Muhammadiyah*, 8(1).
- [16] UUD 1945 pasal 31 berisi tentang beres tentang keseriusan pemerintah terhadap pembangunan pendidikan.
- [17] Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah